

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berjalannya waktu diikuti dengan bergulirnya suasana yang terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, melahirkan suatu keadaan yang tidak selalu sama pada suatu rentang waktu tertentu. Suasana yang berjalan pada waktu tertentu dalam kehidupan bangsa melahirkan suatu era atau zaman yang berbeda. Seperti yang terjadi pada waktu belakangan ini yang telah berjalan kurang lebih 20 tahunan, bangsa ini mengalami pada suatu era atau zaman yang sudah kita rasakan bersama yaitu zaman reformasi. Zaman ini ditandai dengan adanya suatu tekad untuk memperbaiki tata kehidupan yang lebih baik dari zaman yang sebelumnya. Pedoman tata kehidupan berbangsa dan bernegara dalam beberapa hal diubah dengan harapan akan lebih sesuai atau lebih baik dibanding waktu sebelumnya.

Masalah reformasi, Mulyasa(2005) menyampaikan :

Kekuatan reformasi yang hakiki ada pada sumber daya manusianya (SDM) yang berkualitas, serta memiliki visi, transparansi, dan pandangan jauh ke depan; yang tidak hanya mementingkan diri sendiri dan kelompoknya, tetapi senantiasa mengedepankan kepentingan bangsa dan negara dalam berbagai kehidupan kemasyarakatan.

Zaman reformasi yang utama ditandai dengan era keterbukaan dan demokratisasi dalam segala sektor kehidupan bangsa ini. Sistem informasi dan komunikasi yang hampir tidak dapat dibendung menjadi bagian yang mempercepat laju perubahan di segala bidang bahkan sampai pemerintahan di tingkat paling bawah sistem keterbukaan dan demokratisasi terimbas untuk ikut ditegakkan.

Dalam dunia pendidikan juga tidak luput dari perubahan-perubahan yang harus dilakukan oleh segenap unsur yang terlibat di dalamnya. Dalam penyelenggaraan pendidikan masyarakat berhak untuk terlibat, mengetahui, memberikan masukan atau kritik yang membangun melalui mekanisme yang disepakati. Hal ini menuntut penyelenggara pendidikan harus melaksanakan pengelolaan pendidikan yang benar sesuai ketentuan yang berlaku. Apabila yang demikian tidak dilakukan maka masyarakat secara cepat akan dapat memberikan reaksi, masih beruntung bagi sekolah atau penyelenggara pendidikan apabila reaksi yang diberikan berupa kritik atau masukan yang konstruktif, tetapi apabila reaksi yang dilakukan adalah menjauhi atau meninggalkan maka itu adalah suatu yang mengancam eksistensi suatu sekolah atau lembaga pendidikan itu.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 memberikan pemahaman tentang hakekat pendidikan, sebagai berikut :

Pada hakekatnya pendidikan dalam konteks pembangunan nasional mempunyai fungsi : (1) pemersatu bangsa,(2)penyamaan kesempatan, dan (3) pengembangan potensi diri.Pendidikan diharapkan dapat memperkuat keutuhan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), memberikan kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam pembangunan, dan memungkinkan setiap warga negara untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya secara optimal.

Sekolah sebagai lembaga terdepan dalam penyelenggaraan pendidikan mempunyai tanggung jawab besar untuk mewujudkan hakekat pendidikan dalam kerangka pembangunan nasional. Pendidikan akan menjadi wahana untuk memperkuat rasa persatuan dan kesatuan, dan melahirkan generasi bangsa yang berkualitas yang akan mengembangkan potensinya untuk diabdikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang merupakan dasar hukum pelaksanaan reformasi sistem pendidikan nasional menjamin relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan . Hasil pendidikan menjadi bermutu mampu menghadapi tantangan lokal, nasional, dan global. Pada pasal 4 dijelaskan tentang prinsip penyelenggaraan pendidikan; sebagai berikut :

1. Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai kultural,dan kemajemukan bangsa.

2. Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multi makna.
3. Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.
4. Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreatifitas peserta didik dalam proses pembelajaran.
5. Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat.
6. Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

Mengingat sumber daya manusia merupakan aset yang mendasar dan faktor penentu utama bagi keberhasilan pembangunan, maka kualitasnya harus ditingkatkan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kualitas pendidikan termasuk didalamnya pendidikan dasar masih merupakan sebagian masalah pokok pendidikan nasional yang belum terpecahkan dengan baik. Dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah dasar terdapat banyak faktor penentu, akan tetapi yang dipandang sebagai kunci utama keberhasilannya adalah pengelolaan sekolah, sedangkan efektifitas dan efisiensi pengelolaannya sangat ditentukan oleh kepemimpinan kepala sekolah. Keberhasilan

sekolah juga ditentukan pula oleh pengelolaan situasi dan kondisi kelas . Pengelolaan kelas yang baik merupakan wahana bagi terjadinya interaksi belajar dan mengajar dalam rangka peningkatan kualitas proses dan hasil pendidikan. Pengelolaan kelas yang efektif dan efisien harus didukung oleh motivasi dan kompetensi serta kreativitas guru. Motivasi dan kreativitas guru akan sangat tergantung bagaimana pengelolaan yang dilakukan oleh kepala sekolah dalam mengemudikan berjalannya proses pendidikan di sekolah .

Pemerintah dalam hal penyelenggaraan pendidikan mengeluarkan suatu kebijakan yang memberikan acuan bagi sekolah dalam menyelenggarakan proses pendidikan agar dapat efektif dan efisien sehingga mencapai tujuan sesuai indikator yang telah ditentukan. Kebijakan tersebut termuat dalam suatu ketentuan yang harus dipedomani yaitu kebijakan dalam bentuk Standar Pelayanan Minimal (SPM). Ada dua bagian pokok dalam standar pelayanan minimal, satu bagian menjadi kewajiban pemerintah dan satu bagian menjadi kewajiban lembaga penyelenggara pendidikan. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 pasal 51 ayat 1 menyebutkan :

“Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah”

Pernyataan Undang-undang itu mengandung dua hal yang perlu menjadi perhatian khususnya penyelenggara pendidikan usia dini, sekolah dasar, dan pendidikan menengah yaitu : pengelolaan berdasarkan standar pelayanan minimal dan prinsip pengelolaannya menggunakan manajemen berbasis sekolah, dan artinya ada dua hal yang menjadi bahan atau materi yang perlu dipahami bagi pengelola pendidikan usia dini, sekolah dasar, dan sekolah menengah yaitu apa dan bagaimana standar pelayanan minimal dan manajemen berbasis sekolah serta bagaimana hubungan antara standar pelayanan minimal dan manajemen berbasis sekolah.

B. Batasan Masalah

Uraian yang telah disampaikan di muka menunjukkan akan arti pentingnya memahami standar pelayanan minimal dan manajemen berbasis sekolah. Berangkat dari itu maka penulis menyusun suatu paparan atau deskripsi dengan batasan masalah “ Praktik Manajemen Berbasis Sekolah dalam Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di SDN Jetis UPT PAUD dan SD Kecamatan Semanu Kabupaten Gunungkidul Tahun Pelajaran 2016/2017.”

C. Rumusan Masalah

Pada paparan latar belakang intinya adalah tentang pengelolaan lembaga pendidikan menggunakan Manajemen Berbasis Sekolah yang berpedoman pada ketentuan Standar Pelayanan Minimal (SPM) terkait

dengan itu maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah “
Bagaimana Praktik Manajemen Berbasis Sekolah di SDN Jetis UPT
PAUD dan SD Kecamatan Semanu Kabupaten Gunungkidul dan
hubungannya dengan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
tahun pelajaran 2016/2017 “

D. Tujuan Penelitian

Sesuai paparan pada latar belakang dan rumusan masalah maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk memaparkan penerapan atau praktik manajemen berbasis sekolah di SD Negeri Jetis tahun 2016/2017
2. Untuk mengevaluasi pencapaian pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sekolah Dasar Negeri Jetis tahun pelajaran 2016/2017

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak , antara lain :

1. Bagi SD Negeri Jetis
 - a. Untuk mengetahui efektifitas kegiatan penyelenggaraan pendidikan selama satu tahun pelajaran.
 - b. Umpan balik atas pelaksanaan kegiatan pembelajaran maupun praktik lainnya.

2. Bagi peneliti

Sebagai wahana untuk mendapatkan pengalaman dalam pendokumentasian atau pengadministrasian praktik manajemen yang telah dilakukan agar dapat digunakan dalam pengembangan diri maupun lembaga pada waktu yang akan datang.

3. Bagi orang tua/wali murid :

- a. Sebagai informasi yang dapat memberikan pemahaman tentang tata laksana/tata kelola sekolah.
- b. Bahan kajian dan masukan yang dapat dipergunakan sebagai dasar dalam memberikan kritik/saran yang konstruktif demi kemajuan sekolah dan meningkatkan pencapaian hasil yang lebih optimal.

4. Bagi lembaga lain :

- a. Sebagai referensi tentang praktik manajemen yang dapat menambah khasanah pengalaman ditinjau dari segi kekurangan atau kelebihan.
- b. Pembandingan atas praktik manajemen yang telah dilaksanakan untuk mengambil kebijakan pengembangan selanjutnya.

5. Bagi instansi vertikal terkait:

- a. Data untuk memberikan pembinaan dan pengarahan demi peningkatan kinerja organisasi pada waktu yang akan datang.
- b. Informasi pembandingan atas perkembangan atau kemunduran suatu lembaga/organisasi binaannya